

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator dalam menilai kinerja perekonomian, menganalisis sejauh mana hasil pembangunan ekonomi telah tercapai. Sukirno (1994) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu persoalan mendasar ilmu ekonomi yang berfokus pada bagaimana suatu perekonomian mampu meningkatkan output dan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan dari waktu ke waktu harus diperhatikan dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sebagai kemajuan aktivitas ekonomi menghasilkan peningkatan jumlah barang serta jasa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai ukuran dalam prestasi (Umiyati, 2014).

Menurut Todaro (2003), pertumbuhan ekonomi adalah proses bertambahnya output secara berkesinambungan pada setiap tahunnya dan berfungsi indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan sebuah negara. Dalam kajian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai salah satu parameter yang esensial untuk mengukur pencapaian pembangunan dalam cakupan yang lebih luas. Menggambarkan bagaimana aktivitas ekonomi dapat mendorong perubahan dalam struktur sosial masyarakat, yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan (Samosir, 2021).

Pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah tolok ukur untuk menilai kemajuan suatu negara. Dengan adanya kebijakan yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan hasil pembangunan. Kebijakan

pemerintah mencangkup berbagai langkah strategis dalam mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Salah satu faktor krusial dalam mendorong kemajuan sektor IKM adalah peran aktif pemerintah. Pemerintah dapat menyediakan berbagai fasilitas, antara lain pembiayaan, program pelatihan, pengembangan teknologi, serta kemudahan akses ke pasar. Di samping itu, pemerintah juga dapat merumuskan kebijakan mendukung pertumbuhan IKM, misalnya dengan menyederhanakan prosedur perizinan dan memberikan keringanan beban pajak (Umiyati, 2014).

Konsep teknologi mengacu pada kapasitas individu, organisasi, maupun masyarakat dalam mengadopsi serta menggunakan teknologi baru agar efisiensi, efektivitas, serta daya saing. Di era digital ketika kemajuan teknologi berlangsung sangat cepat dan memengaruhi berbagai bidang kehidupan dan bisnis, kemampuan beradaptasi terhadap teknologi menjadi semakin penting. Dalam ranah bisnis, kemampuan ini mendukung organisasi dalam meningkatkan kinerja dan memberikan pengalaman yang lebih optimal kepada pelanggan. Sebagai contoh, perusahaan dapat menerapkan teknologi otomatisasi untuk memperbaiki efisiensi proses produksi sekaligus menekan biaya operasional serta teknologi digital perusahaan memperluas pangsa pasar

Digitalisasi IKM muncul sebagai salah satu solusi untuk menghadapi berbagai tantangan di era digital saat ini. Proses ini melibatkan pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi pada bisnis, produksi, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan administrasi. Dalam praktiknya, digitalisasi ini dapat diwujudkan melalui situs web, media sosial, aplikasi mobile, dan e-commerce.(Umiyati, 2014)

Manfaat utama dari penerapan digitalisasi pada sektor IKM adalah meningkatnya efisiensi dan produktivitas usaha. Melalui pemanfaatan teknologi, IKM dapat mempercepat proses produksi dan distribusi, sekaligus mengelola persediaan serta keuangan dengan lebih optimal. Selain itu, digitalisasi turut mendukung peningkatan visibilitas dan daya saing IKM di pasar internasional, karena memberikan akses yang lebih luas ke platform e-commerce dan berbagai pasar digital.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IKM) sektor ekonomi dimana mayoritas masyarakat Indonesia serta penopang utama sumber penghasilan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah 2015, IKM di Indonesia menyumbang sekitar 90% dari total pelaku usaha, sedangkan sisanya, sekitar 10%, dikategorikan sebagai usaha skala besar. Meskipun IKM tidak termasuk kategori usaha besar, perannya dalam menggerakkan sektor perekonomian negara sangatlah signifikan. IKM 60% berasal dari sektor ini. (Suyadi, 2018)

Di era digital yang terus berkembang, IKM, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, IKM diartikan usaha produktif dimiliki perorangan atau badan usaha perorangan memenuhi kriteria Usaha Mikro. IKM berperan sebagai pilar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik melalui peningkatan jumlah unit usaha, penciptaan lapangan kerja, maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). DaIKM menyumbang sekitar 57–60% terhadap PDB nasional dan mampu menyerap hingga 97% tenaga kerja di Indonesia. (Ardianto et al., 2024)

Setelah krisis ekonomi tahun 1998, jumlah IKM di Indonesia tidak mengalami penurunan, melainkan justru mengalami peningkatan yang signifikan, dengan

kemampuan menyerap tenaga kerja sebanyak 85 juta sampai 107 juta orang hingga tahun 2012. Periode tersebut, tercatat terdapat 56.534.591 pelaku usaha di Indonesia. Meskipun demikian, IKM mempunyai tantangan seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, kurang optimalnya bimbingan dan pendampingan, rendahnya penguasaan teknologi, permasalahan permodalan, lemahnya manajemen usaha, keterbatasan infrastruktur, kesulitan memperoleh bahan baku, serta hambatan dalam perizinan usaha atau legalitas badan hukum dan pemasaran produk.

Pemerintah terus berupaya memperkuat pengembangan sektor IKM guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mengoptimalkan potensi yang tersedia. Dalam rangka pengembangan IKM, pemerintah telah menetapkan kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kebijakan ini mencakup aspek, di antaranya pemberdayaan IKM, penciptaan iklim usaha kondusif, peningkatan usaha, perluasan akses pembiayaan dan kredit, pembangunan kemitraan strategis.

Arus globalisasi dan kemajuan digitalisasi yang kian pesat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IKM) dengan struktur perekonomian suatu negara. IKM tidak hanya memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), berperan sebagai sumber utama penciptaan lapangan kerja. Untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan IKM, diperlukan kolaborasi yang multidimensional antara akademisi, sektor bisnis, dan pemerintah. Setiap entitas ini memiliki tanggung jawab dan peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan penguatan kapasitas IKM (Octiva et al., 2024).

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Jawa Timur berkomitmen untuk mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IKM) Jawa Timur dengan jumlah IKM signifikan, tercatat sebanyak 6. 825.931 berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh IKM, seperti tantangan dalam aspek permodalan, strategi pemasaran, ketersediaan bahan baku, pemanfaatan teknologi, manajemen usaha, serta penguatan jaringan kemitraan.

Upaya pengembangan di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, menjadi salah satu wilayah yang aktif dalam penguatan sektor IKM. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, serta Perdagangan Ponorogo, jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di daerah ini mencapai 38.387unit, yang tersebar di 21 kecamatan. IKM tersebut terbagi ke dalam tiga jenis bidang, yaitu: bidang perdagangan dengan total 24.196 usaha, bidang produksi sebanyak 7. 321 usaha, dan bidang jasa dengan 6. 870 usaha. Dari ketiga kategori tersebut, sektor perdagangan mendominasi keberadaan IKM di Kabupaten Ponorogo yang tersebar di seluruh kecamatan (Imelda, 2023). Dengan uraian mengenai peran strategis Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Ponorogo, diperlukan data pembandingan yang dapat menunjukkan posisi Ponorogo di tingkat regional Jawa Timur sebagai berikut:

**Tabel 1 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Investasi, dan Nilai Produksi
pada Industri Mikro dan Kecil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Timur, 2019**

Kabupaten	Perusahaan Number Of Companies	Tenaga Kerja Number Of Employees	Nilai Produksi (Ribu Rupiah) Production Value (Thousand Rupiahs)
Pacitan	40,441	70,729	1,667,072,095
Ponorogo	23,536	42,144	1,361,802,915
Trenggalek	28,043	58,482	1,518,524,914
Tulungagung	40,588	77,928	4,443,719,101
Blitar	35,498	74,533	2,977,446,157
Kediri	23,613	43,858	4,051,085,767
Malang	39,722	83,605	3,317,989,831
Lumajang	11,223	24,441	2,707,477,815
Jember	37,254	82,924	3,463,487,136
Banyuwangi	34,811	50,398	1,774,803,578
Bondowoso	43,001	109,411	1,883,583,831
Situbondo	35,924	106,438	1,033,797,741
Probolinggo	39,597	152,627	2,043,868,181
Pasuruan	23,730	44,242	3,452,935,820
Sidoarjo	15,730	43,842	6,163,958,314
Mojokerto	20,817	46,057	3,565,805,009
Jombang	21,798	89,900	6,666,459,028
Nganjuk	13,277	26,787	2,663,478,816
Madiun	10,299	19,296	1,248,021,247
Magetan	21,235	34,248	945,851,100
Ngawi	13,586	26,635	923,384,530
Bojonegoro	35,771	91,438	2,019,296,369
Tuban	14,275	30,885	4,178,873,039
Lamongan	30,772	93,791	4,691,736,486
Gresik	14,146	31,291	1,596,043,841
Bangkalan	19,188	28,755	648,904,776
Sampang	18,288	95,781	1,791,040,303
Pamekasan	46,714	453,547	1,140,053,315
Sumenep	42,976	121,883	1,843,587,496
Kota / Minicipality			
Kediri	4,007	7,398	619,813,485
Blitar	3,714	8,145	550,411,855
Malang	13,111	27,356	1,621,074,989
Probolinggo	3,941	6,762	744,119,429
Pasuruan	5,591	16,805	1,669,575,287
Mojokerto	2,250	4,632	272,293,069
Madiun	3,848	7,189	294,297,872
Surabaya	15,650	38,176	2,928,797,230
Batu	3,494	8,314	433,748,468
Jawa Timur	862,450	2,380,673	84,938,207,342

Sumber: BPS 2019

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2019), Kabupaten Ponorogo memiliki 23.536 unit Industri Mikro dan Kecil (IMK) yang menyerap

42.144 tenaga kerja dengan nilai produksi mencapai Rp1,36 triliun. Capaian ini menegaskan bahwa IKM menjadi pilar penting penggerak ekonomi lokal. Namun, jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur yang memiliki nilai produksi lebih tinggi meskipun jumlah unit usahanya sebanding, maka potensi Ponorogo masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan inovasi dan adopsi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan pemerintah daerah, dukungan peran akademisi, serta kesiapan pelaku IKM dalam menyerap teknologi agar produktivitas usaha dapat ditingkatkan secara berkelanjutan

Peran perguruan tinggi juga menjadi faktor penting dalam mendukung penguatan sektor IKM di Ponorogo melalui berbagai program pengabdian masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Ponorogo (LPPM UMPO) secara konsisten melaksanakan berbagai program pendampingan antara lain:

Tabel 2 Program Pengabdian LPPM UMPO untuk Pemberdayaan IKM Ponorogo

No	Program atau Lokasi	Tahun	Kegiatan
1.	Inovasi Kemasan & Label Gethuk Singkong, Desa Poko	2024	Pelatihan UMKM Mengubah Gethuk Singkong Menjadi Keripik Gethuk Dengan Inovasi Kemasan Modern Dan Branding Digital Melalui E-Commerce.
2.	Optimalisasi UMKM Desa Tulung, Sampung	2022	KKN Tematik: Pendampingan UMKM Menuju Desa Cerdas, Pembuatan Website Desa, Sosialisasi Digitalisasi Usaha Lokal.
3.	KKN Digital Marketing Desa Pudak Wetan	2024	Pelatihan Literasi Digital Untuk UMKM, Sosialisasi Microsoft Word, Marketing Digital, Dan Penguatan Kesadaran Sosial.
4.	Inovasi Anyaman Daun Pandan, Desa Wonorejo	2024	Kkn Reguler: Pelatihan Inovasi Desain, Pengemasan Produk Umkm, Strategi Pemasaran Online Untuk Kerajinan Lokal.
5.	Sosialisasi Marketplace & Robot Line Follower, Dusun Gunungsari	2024	KKN Tematik: Pelatihan Penggunaan Marketplace Untuk

			UMKM Lokal Dan Edukasi Robotika Untuk Generasi Muda.
6.	Inovasi Tiwul Instan, Desa Sriti	2024	Pelatihan Produksi Tiwul Instan: Optimasi Proses, Kemasan Standing Pouch, Strategi Digital Marketing.
7.	Inovasi Label & Kemasan Peyek Homemade Bu Sri, Desa Duri Jenggiring Slahung	2024	Branding Peyek Rumahan: Desain Kemasan & Logo, Pelatihan Instagram Bisnis Untuk UMKM Peyek.
8.	Resiliensi Desa Kupuk melalui Optimalisasi Sosial Media, Kecamatan Bungkal	2024	Program Pengabdian: Pendampingan Desa Kupuk Mempublikasikan Potensi Desa Melalui Pelatihan Optimalisasi Media Sosial.

Sumber: LPPM UMPO

Keberadaan berbagai program pelatihan, inovasi, dan pendampingan oleh LPPM UMPO tersebut menunjukkan bahwa sinergi triple helix antara pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku IKM menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing IKM. Dengan demikian, potensi IKM Ponorogo dapat dioptimalkan melalui inovasi teknologi dan strategi penguatan manajemen usaha secara berkelanjutan.

Hasil observasi dengan salah satu pelaku IKM dikecamatan Ngrayun, Bahwa peran akademisi dalam dunia Industri Kecil Menengah (IKM) sangatlah penting, mengingat bahwa IKM merupakan pilar utama ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Akademisi memiliki kemampuan untuk menyediakan penelitian, analisis, dan inovasi yang dapat mendorong peningkatan kinerja serta keberlanjutan IKM. Namun, dalam praktiknya, banyak akademisi yang belum memberikan umpan balik yang berarti kepada pelaku IKM. Hal ini menciptakan tantangan dalam menjembatani teori akademis dengan praktik bisnis yang ada (Observasi, 2025)

Salah satu penyebab minimnya umpan balik ini adalah kurangnya interaksi dan komunikasi yang efektif antara kedua pihak. Banyak pelaku IKM yang belum mengetahui penelitian atau program yang dilakukan oleh akademisi terkait industri mereka. Sebaliknya, akademisi oleh IKM untuk kegiatan sehari-hari. Akibatnya, hasil penelitian yang seharusnya bermanfaat bagi pengembangan IKM menjadi tidak tersampaikan atau tidak relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan (Observasi, 2025)

Selain itu, kurangnya kolaborasi antara dunia akademis dan IKM juga menghambat transfer pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan. Dalam banyak situasi, akademisi terjebak dalam lingkungan akademis yang lebih fokus pada publikasi, sementara IKM memerlukan solusi yang praktis dan aplikatif. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan platform sinergi yang memungkinkan akademisi dan pelaku IKM untuk berkolaborasi, bertukar pengalaman, dan membagikan pengetahuan. Dengan demikian, akademisi diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih konkret kepada IKM melalui pelatihan, seminar, atau workshop yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Dengan melibatkan mahasiswa dalam program penelitian yang langsung berkaitan dengan IKM, akademisi dapat memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis yang berharga. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat yang lebih terencana dapat menjadi jembatan bagi akademisi untuk memberikan umpan balik yang nyata kepada pelaku IKM. Melalui kolaborasi yang lebih erat, diharapkan IKM dapat tumbuh dengan pesat dan kontribusinya terhadap perekonomian semakin signifikan (Observasi, 2025)

Kolaborasi bisnis kini menjadi strategi yang semakin krusial dalam pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Melalui kolaborasi ini, IKM dapat meraih beragam manfaat yang signifikan, yang berdampak positif pada pertumbuhan dan daya saing mereka. Kerjasama antara IKM dengan pelaku usaha lain, lembaga pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah mampu menciptakan sinergi yang memperkuat posisi mereka di pasar. Kolaborasi antar perusahaan juga berpotensi meningkatkan inovasi dan kreativitas. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi mampu memperluas akses IKM terhadap pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk berkembang (Moehadi; et al., 2025)

Salah satu cara efektif untuk mendorong pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) adalah melalui kemitraan strategis. Kemitraan ini di bidang pemasaran, distribusi, maupun pengembangan produk. IKM yang terlibat dalam kemitraan strategis cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan dengan yang beroperasi secara mandiri. Melalui kolaborasi ini, IKM dapat berbagi risiko, biaya, dan sumber daya, dengan demikian mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas cakupan pasar yang dapat dijangkau.

Pemerintah daerah berperan sebagai stabilisator yang memiliki tanggung jawab penting untuk menjaga stabilitas iklim usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IKM). IKM lebih meningkat, diperlukan iklim usaha kondusif dan stabil. Salah satu cara untuk menciptakan iklim usaha yang stabil adalah dengan memberikan bantuan modal kepada pelaku IKM (Salam & Prathama, 2022).

Komponen utama yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan suatu usaha produktif di kalangan masyarakat adalah keberadaan bantuan modal. Bantuan modal ini memiliki memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap

peningkatan pendapatan para pelaku usaha. Tanpa adanya modal yang cukup, setiap usaha akan menghadapi berbagai kesulitan dalam proses pengembangan, yang tentunya akan mempengaruhi upaya peningkatan pendapatan mereka.(Salam & Prathama, 2022)

Dengan adanya dukungan dana tersebut, IKM dapat menikmati stabilitas maka peran Pemerintah Daerah, sebagai stabilisator, untuk menyediakan berbagai bentuk bantuan modal kepada pelaku IKM. Peran pemerintah dalam hal ini sangat krusial untuk mendukung pengembangan IKM secara efektif.(Salam & Prathama, 2022)

Kolaborasi juga dapat meningkatkan akses IKM terhadap pasar yang lebih luas. Melalui jaringan kolaboratif, IKM dapat terhubung dengan pelanggan potensial dan mitra bisnis yang lebih besar. Jaringan kolaborasi membantu IKM menjalin hubungan yang lebih solid dengan pelanggan serta mendorong peningkatan loyalitas mereka. Melalui hubungan yang baik dengan pelanggan, IKM dapat mendongkrak penjualan dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Faktor utama penyebab kesenjangan ini adalah masih banyaknya IKM di daerah tertinggal yang menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi modern dan infrastruktur digital yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pendampingan berbasis teknologi dengan biaya terjangkau. Melalui pemanfaatan perangkat teknologi sederhana namun efektif, program ini memberikan solusi praktis bagi pelaku IKM. Pendekatan ini memungkinkan IKM mengatasi hambatan digital yang selama ini menjadi tantangan utama. Dengan teknologi yang terjangkau, usaha kecil dan menengah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan tetap bersaing di pasar digital. Lebih jauh lagi, strategi ini juga mendukung

pemberdayaan komunitas lokal melalui peningkatan literasi digital dan penguatan keterampilan teknologi yang relevan untuk keberlanjutan usaha (Sumarni et al., 2024).

Sistem inovasi daerah seringkali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, akses ke teknologi, serta ketidakmampuan IKM dalam mengadopsi inovasi baru. Oleh karena itu, penerapan kolaborasi Triple Helix dapat menjadi alternatif untuk mengatasi masalah ini. Dengan melibatkan universitas sebagai pusat riset, pemerintah sebagai fasilitator kebijakan, dan IKM sebagai penerima manfaat, ekosistem inovasi di daerah akan lebih terstruktur dan berkelanjutan

1.2 Rumusan Masalah

Tugas dan peran pemerintah tidak hanya mendukung IKM dalam hal aspek pembiayaan/modal, keterampilan pekerja serta pemasaran produknya, namun juga bagaimana para penggiat bisnis IKM dapat mengadopsi teknologi serta berperan aktif dalam mendorong berbagai terobosan inovatif di bidang produk, organisasi, pemasaran, serta proses bisnis yang dilakukannya.

Selain itu peran akademisi juga sangat berpengaruh terhadap IKM dalam mewujudkan inovasi daerah yang dapat memberikan keuntungan di berbagai pihak. Yangmana akademisi merupakan pemikir inti dalam pewujudan inovasi daerah. Dengan memberikan berbagai pengetahuan dan inovasi teknologi kepada ikm dan pemerintah.

Dalam pelaksanaannya ketiganya harus saling mendukung untuk mewujudkan keberhasilan sesuai harapan. Dengan memberikan kinerja sesuai tupoksinya, tidak menutup kemungkinan akan mempermudah inovasi daerah tersebut bisa terwujud dengan baik dan sesuai harapan.

Pemerintah mempunyai peran kepada Industri Kecil Menengah (IKM). Tugas utama pemerintah tidak hanya terbatas pada dukungan finansial atau penyediaan modal, tetapi juga meliputi berbagai aspek penting lainnya, seperti pengembangan keterampilan pekerja, pemasaran produk, dan inovasi teknologi. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menciptakan ekosistem yang mendukung IKM terhadap perubahan pasar serta tuntutan konsumen. Meningkatkan keterampilan pekerja menjadi fondasi yang sangat penting, sehingga program pelatihan, pengembangan sumber daya manusia diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pekerja di sektor IKM (Harninda, 2022).

Di sisi lain, pemasaran produk merupakan tantangan tersendiri bagi IKM. Pemerintah perlu berperan aktif dalam membantu identifikasi pasar potensial, memberikan pelatihan mengenai teknik pemasaran modern, serta memfasilitasi akses ke platform pemasaran digital. Program tidak hanya akan meningkatkan visibilitas produk IKM, namun memperluas jangkauan pasarnya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, IKM dapat berinteraksi langsung dengan konsumen, memperoleh masukan, serta melakukan inovasi produk yang lebih sesuai dengan tuntutan pasar (Harninda, 2022).

Lebih jauh lagi, adopsi teknologi menjadi kunci utama bagi pelaku bisnis IKM untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pemerintah harus mendorong penerapan teknologi baru dalam proses produksi, seperti otomatisasi dan penggunaan perangkat lunak manajemen yang lebih baik, agar IKM tidak ketinggalan dalam persaingan global. Terobosan inovatif dalam produk, organisasi, pemasaran, dan proses bisnis perlu didorong melalui insentif dan kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan.(Harninda, 2022)

Akhirnya, partisipasi aktif dari pelaku bisnis IKM dalam menciptakan terobosan inovatif akan menghasilkan daya saing yang lebih baik. Mereka harus didorong untuk berbagi pengalaman, berkolaborasi, dan membangun jaringan yang solid. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan IKM, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang dinamis dan berkelanjutan melainkan berkembang dalam iklim ekonomi kompetitif. (Harninda, 2022) Dari penjabaran latar belakanh dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kapasitas inovasi oleh IKM di Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah keterlibatan akademisi berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kapasitas inovasi oleh IKM di Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah interaksi kebijakan pemerintah dan akademisi berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kapasitas inovasi oleh IKM di Kabupaten Ponorogo?
4. Apakah daya serap teknologi berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kapasitas inovasi oleh IKM di Kabupaten Ponorogo?
5. Apakah faktor kontrol berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kapasitas inovasi oleh IKM di Kabupaten Ponorogo?
6. Apakah kebijakan pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap faktor control oleh IKM di Kabupaten Ponorogo?
7. Apakah keterlibatan akademisi berpengaruh secara langsung terhadap faktor control oleh IKM di Kabupaten Ponorogo?
8. Apakah interaksi kebijakan pemerintah dan akademisi berpengaruh secara langsung terhadap faktor control oleh IKM di Kabupaten Ponorogo?

9. Apakah daya serap teknologi berpengaruh secara langsung terhadap faktor kontrol oleh IKM di Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh berbagai faktor, baik internal atau eksternal terhadap peningkatan kapasitas inovasi pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Ponorogo. Tujuan penelitian secara khusus dirumuskan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kapasitas inovasi oleh IKM di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui apakah keterlibatan akademisi berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kapasitas inovasi oleh IKM di Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui apakah interaksi kebijakan pemerintah dan akademisi berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kapasitas inovasi oleh IKM di Kabupaten Ponorogo.
4. Untuk mengetahui apakah daya serap teknologi berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kapasitas inovasi oleh IKM di Kabupaten Ponorogo.
5. Untuk mengetahui apakah faktor kontrol berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kapasitas inovasi oleh IKM di Kabupaten Ponorogo.
6. Untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap faktor kontrol pada IKM di Kabupaten Ponorogo.
7. Untuk mengetahui apakah keterlibatan akademisi berpengaruh secara langsung terhadap faktor kontrol pada IKM di Kabupaten Ponorogo.

8. Untuk mengetahui apakah interaksi kebijakan pemerintah dan akademisi berpengaruh secara langsung terhadap faktor kontrol pada IKM di Kabupaten Ponorogo.
9. Untuk mengetahui apakah daya serap teknologi berpengaruh secara langsung terhadap faktor kontrol pada IKM di Kabupaten Ponorogo.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pelaku IKM di Kabupaten Ponorogo, sehingga kebijakan yang diterapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan di lapangan.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan wawasan keilmuan, khususnya di bidang Ekonomi, serta menjadi referensi atau acuan bagi penelitian-penelitian mendatang yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan peran akademisi dalam mendukung inovasi IKM.

3. Bagi Peneliti:

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan dan mentransformasikan pengetahuan yang diperoleh selama masa studi ke dalam praktik nyata di dunia kerja. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami kondisi riil mengenai keterlibatan pemerintah dan akademisi dalam pengembangan IKM, sekaligus menambah pengalaman lapangan yang bermanfaat untuk pengembangan diri di masa mendatang.